

## Kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta sebagai Ruang Publik dalam Perspektif Kritik Postkolonial

Diana Kurnia Putri

(Pascasarjana Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik, UIN Sunan Kalijaga)

Email: dianakurniap94@gmail.com

### Abstract

*Yogyakarta City is known as a city with a rich cultural heritage of the meaning philosophy of life for its citizens. Zero Kilometer point area is the public space of the Yogyakarta city which is located in the center of Yogyakarta city. Public space is an important element that portrays an urban image as space for social interaction and becomes an icon of a city. This study aims to determine strategy of Yogyakarta city government in effort to arrangement region at Zero Kilometer point Yogyakarta as public space with analysis using post-colonial criticism theory. The research method used qualitative descriptive by explaining effort to arrange area at Zero Kilometer point by Yogyakarta goverment using post-colonial theory in the concept of mimicry. The analysis show that Zero Kilometer point area is a public space that contains a variety of activities that shape the social interaction of its users from various communities. In addition, the concept of regional arrangement at the Zero Kilometer Yogyakarta mimics the architecture style of Dutch colonial buildings.*

**Keywords:** *Public Space, Zero Kilometer Yogyakarta, Postcolonial Criticism*

### Abstrak

*Kota Yogyakarta dikenal sebagai kota dengan warisan kebudayaan yang kaya akan makna filosofi hidup bagi warga masyarakatnya. Kawasan titik Nol Kilometer adalah ruang publik kota Yogyakarta yang letaknya berada tepat di pusat kota Yogyakarta. Ruang publik adalah unsur penting yang menggambarkan citra perkotaan sebagai ruang interaksi sosial dan menjadi ikon sebuah kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemerintah kota Yogyakarta dalam upaya penataan kawasan di titik Nol Kilometer Yogyakarta sebagai ruang publik dengan analisa menggunakan teori kritik postkolonial. Metode penelitian yang digunakan berupa deskriptif kualitatif dengan menjelaskan upaya penataan kawasan di titik Nol Kilometer yang dilakukan oleh pemerintah Yogyakarta dengan menggunakan teori kritik postkolonial dalam konsep mimicry. Hasil analisis menunjukkan bahwa kawasan titik Nol Kilometer merupakan ruang publik yang memuat berbagai macam kegiatan yang membentuk interaksi sosial penggunanya dari berbagai kalangan masyarakat. Selain itu, konsep penataan kawasan di titik Nol Kilometer Yogyakarta tersebut meniru gaya arsitektur bangunan kolonial Belanda.*

**Kata kunci:** *Ruang publik, Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Kritik Postkolonial*

---

### PENDAHULUAN

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah sebuah daerah otonomi setingkat provinsi di Indonesia dengan ibu kota provinsinya adalah Yogyakarta. Banyaknya objek wisata dan daya

tarik di kota Yogyakarta yang kental akan potensi budayanya, baik budaya yang tangible (fisik) maupun yang intangible (non fisik). Potensi budaya yang tangible antara lain adalah kawasan cagar budaya dan benda cagar budaya, sedangkan potensi yang

intangible seperti gagasan, sistem nilai atau norma, karya seni, sistem sosial atau perilaku sosial yang ada dalam masyarakat (Mutiar Arbaita Aulia, 2017:2).

Pada zaman didirikannya Kraton Ngayogyakarta, Pangeran Mangkubumi membangun Keraton dengan arah menghadap Gunung Merapi, yang mengartikan bahwa kraton menghormati si penguasa alam. Apabila ditarik garis secara imajiner, maka antara Gunung Merapi, kraton dan Laut Selatan berada dalam satu garis lurus. Garis inilah yang kemudian menjadi cikal bakal pola kota Yogyakarta sampai saat ini.

Titik Nol Kilometer yang dikenal sebagai pusat Kota Yogyakarta ini mempunyai garis sumbu imajiner yang menghubungkan antara pantai Laut Selatan, Keraton hingga Gunung Merapi (Mustika Kusumaning Wardhani, 2018:5). Selain garis imajiner, Yogyakarta juga memiliki sumbu filosofis yakni Tugu Pal, Keraton dan Panggung Krapyak, yang dihubungkan secara nyata berupa jalan. Selain itu, kawasan di sekitar titik nol kilometer adalah kawasan wisata sejarah karena di kanan kiri ada bangunan-bangunan kuno yang sering juga disebut loji. Loji merupakan bangunan-bangunan tua yang besar sisa sejarah peninggalan Belanda. Loji adalah gedung besar atau kantor atau benteng kompeni masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada daerah Yogyakarta, dapat ditemukan sejumlah loji yang menarik untuk dilihat. Bagi mereka yang menyukai fotografi, Loji ini dapat dijadikan obyek fotografi yang akan menampilkan suasana klasik dan dapat menghantarkan kita pada sebuah kemegahan di masa lampau.

Loji tertua di Yogyakarta adalah Benteng Vredenburg atau disebut loji besar atau loji gedhe. Benteng Vredenburg dibangun pada tahun 1776-1778. Benteng yang semula bernama Rustenburg tersebut konon sengaja didirikan di poros Keraton Yogyakarta agar bisa mengawasi gerak-gerik penduduk

Keraton. Berhadapan dengan loji gedhe, terdapat loji Kebon atau sekarang dikenal sebagai Gedung Agung atau Istana Kepresidenan. Bangunan ini didirikan tahun 1824 dengan lahan seluas 43.585 m<sup>2</sup>. Istana Yogyakarta ini terdiri dari enam bangunan utama yaitu Gedung Agung (gedung utama), Wisma Negara, Wisma Indraphrasta, Wisma Sawojajar, Wisma Bumiretawu, dan Wisma Saptapratala. Kemudian, terdapat loji kecil yang letaknya di sebelah timur Benteng Vredenburg, yaitu mulai dari bangunan pasar buku Shopping hingga perempatan Gondomanan. Loji kecil lainnya adalah loji yang berada di kompleks Taman Pintar. Kawasan loji kecil adalah pusat kawasan hunian orang belanda pertama di Yogyakarta.

Kawasan titik nol kilometer juga menjadi sentra perekonomian bagi masyarakat Yogyakarta karena letaknya yang sangat strategis, seperti kawasan Malioboro yang menjual berbagai jenis oleh-oleh khas Yogyakarta mulai dari pakaian, pernak-pernik, makanan, minuman, dan lainnya. Pasar Beringharjo juga menyediakan berbagai model pakaian batik, namun hanya beroperasi mulai pagi sampai sore hari, berbeda dengan Malioboro yang beroperasi sampai malam hari. Kemudian, kawasan Jalan Kyai Ahmad Dahlan, serta kawasan Jalan Wijilan yang selalu dipadati wisatawan. Pada malam harinya, sepanjang Jalan trotoar sekitar perempatan Jalan Jenderal Ahmad Yani dan Jalan KH Ahmad Dahlan menjadi tempat bersantai menghabiskan malam, dengan menikmati alunan lagu dari musisi jalanan. Banyak komunitas juga berkumpul untuk mencari inspirasi dan menyalurkan bakat dengan berekspresi, seperti komunitas fotografi, komunitas sketching, komunitas sepatu roda, komunitas sepeda BMX, dan masih banyak lainnya.

Deskripsi dari penyebutan kawasan titik Nol Kilometer sebagai ruang publik kota Yogyakarta dikarenakan kawasan tersebut telah membentuk citra kota dengan adanya

bangku taman yang khas dan tempat duduk marmer berbentuk bola yang khas sebagai ruang yang memediasi terjadinya interaksi antar masyarakat. Ruang sebagai suatu wadah aktivitas manusia berfungsi sebagai wadah bergerak dan beraktivitas masyarakat. Ruang publik yang memiliki fungsi elemen kota sangat berkontribusi dalam pembentukan karakter visual yang diberikan dan mempunyai fungsi interaksi sosial didalamnya. Hal inilah yang mendasari penulis untuk membahas ruang publik di kawasan titik Nol Kilometer Kota Yogyakarta melalui perspektif kritik postkolonial.

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diminati. Penelitian ini langsung dilakukan di lapangan dan dilengkapi dengan sejumlah responden sebagai narasumber untuk kelengkapan data. Metode pengamatan dan pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan metode primer dan sekunder. Metode Primer diterapkan untuk memperoleh data secara langsung sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pengumpulan data dengan metode primer dilakukan dengan cara: Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung serta mencatat dan mendokumentasikan apa yang dilihat dan didapat sesuai dengan data yang dibutuhkan sehingga dapat mengetahui proses penelitian secara langsung. Wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang terkait untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

Metode sekunder diterapkan untuk memperoleh teori dan informasi pendukung yang diperlukan dalam penyusunan karya ilmiah dengan cara studi pustaka, yaitu

dengan mempelajari literatur terkait dengan masalah dan objek yang akan dibahas, yang dilakukan melalui berbagai media, baik media cetak ataupun media elektronik.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Pola ruang adalah pembagian peruntukan penggunaan ruang dalam suatu wilayah yang dibagi menjadi dua fungsi ruang yaitu fungsi kawasan lindung sebagai keseimbangan lingkungan hidup serta sosial dan fungsi pengembangan kawasan budidaya untuk pengembangan perkotaan kedepannya (Rahman, 2017:123). Ruang publik dapat masuk dalam kategori kawasan lindung bila dilihat sebagai ruang terbuka hijau, menurut pengertian umum, ruang publik yaitu ruang-ruang yang berorientasi pada manusia (*people oriented spaces*). Stephen Carr mengidentifikasikan lima kebutuhan dasar kepuasan pengguna ruang publik yaitu kenyamanan, relaksasi, keterikatan pasif & aktif, dan penemuan. Pengertian ruang publik secara singkat merupakan suatu ruang yang berfungsi untuk kegiatan-kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Darmawan menyatakan bahwa dalam perencanaan kota perlu diuraikan fungsi daripada ruang publik yang meliputi:

- 1) Sebagai wadah interaksi, komunikasi warga, baik interaksi formal hingga non formal.
- 2) Membentuk koridor-koridor yang dapat menjadi wadah dan pembentuk batasan ruang sesuai penggunaan bangunan pada kawasan sekitar dan sebagai ruang transit.

- 3) Sebagai tempat pedagang kaki lima yang menjajakan makanan dan minuman, souvenir, dan jasa entertainment.
- 4) Sebagai paru-paru kota yang menyegarkan kawasan sekaligus sebagai ruang evakuasi untuk menyelamatkan masyarakat apabila terjadi bencana alam.

Secara konseptual, ruang publik memiliki fungsi sebagai tempat berkumpulnya masyarakat dari berbagai kalangan, karena banyak kegiatan dan interaksi sosial yang bisa dilakukan di ruang public. Dalam konteks pembangunan perkotaan yang ideal, fungsi ruang publik sangatlah penting untuk diprioritaskan karena hidup di lingkungan perkotaan membuat masyarakat sangat membutuhkan ruang untuk bernapas, bergerak, berinteraksi dengan warga lain dan beristirahat untuk sekedar melepas lelah setelah seharian sibuk dengan berbagai aktivitas yang menguras tenaga dan pikiran. Hal itulah yang menjadi wujud ruang publik sebagai ruang yang aksesibel bagi warga baik secara individu maupun kelompok (Gani, 2017).

Carmona dalam bukunya "Public Places Urban Space" (2003), menyebutkan ruang terbuka public memiliki beberapa fungsi, yaitu peran ekonomi, politik, kesehatan, sosial dan lingkungan. Selanjutnya, Carmona mengatakan bahwa ruang publik memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- 1) Positive space, ruang ini digunakan bagi aktivitas-aktivitas yang bermuara pada arah positif. Ruang ini biasanya dikelola oleh pemerintah. Mempunyai bentuk alami, semi alami dari suatu ruang public maupun pada ruang terbuka public.
- 2) Negative space, ini kebalikan dari ruang positive, ruang ini mengarah pada kegiatan yang terbentuk kurang baik maupun kurang terkelola. Sehingga mengakibatkan penurunan

fungsi ruang terbuka public dari aspek kenyamanan dan keamanan.

- 3) Ambiguous space, merupakan ruang pendukung yang menjadi kegiatan peralihan masyarakat dari aktivitas utama contohnya adalah ruang bersantai di pertokoan, cafe, rumah peribadatan, ruang rekreasi, dan lain sebagainya.
- 4) Private space, ruang yang dimiliki oleh masyarakat, pada umumnya seperti ruang terbuka privat, halaman rumah dan ruang di dalam bangunan.

Terus berkembangnya perkotaan membuat ketersediaan ruang publik sebagai wadah untuk beraktivitas akan semakin sedikit, hal dikarenakan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat namun ketersediaan ruang publik yang berfungsi sebagai wadah aktivitas tidak kunjung bertambah. Akhirnya, ruang publik yang sudah ada dituntut lebih oleh masyarakat dalam mengakomodasi segala kebutuhannya yang mana tuntutan akan pemenuhan kebutuhan tersebut berdampak pada pola aktivitas dan pemanfaatan terhadap ruang di dalamnya.

Dari aspek esensial maka ruang publik mempunyai beberapa kriteria yaitu:

- 1) Maeningful, menciptakan pemaknaan ruang individu dan kelompok bagi masyarakat.
- 2) Responsive, mencakup berbagai kegiatan yang diinginkan oleh pengguna sehingga dapat tercipta aktivitas kegiatan yang diinginkan pada ruang tersebut.
- 3) Democratic, menciptaka rasa keterbukaan, kebebasan dan tidak ada diskriminasi bagi semua lapisan warga.

Tatanan ruang kota selalu dihubungkan dengan jaringan jalan dan lingkungan sebagai tempat kegiatan masyarakat. Suatu lingkungan dianggap baik apabila mampu menerima perubahan dimasa depan,

mengakomodasikan keadaan saat ini tanpa mengancam keberlangsungan masa lalu yang sustainable (Mustika Kusumaning Wardhani, 2018:6).

Dalam hal ini, postkolonial muncul sebagai bentuk kritik terhadap penjajahan beserta dampak-dampak yang mengikuti. Postkolonialisme merupakan bentuk penyadaran dan kritik atas neo-kolonialisme serta hubungan hegemonis kekuasaan dalam bermacam-macam konteks. Dalam hal ini, pengertian postkolonial atau pascakolonial bukan diartikan sebagai sesudah penjajahan, dekolonisasi, atau pasca kemerdekaan. Namun, postkolonial muncul ketika terjadi proses hegemoni-dominasi oleh yang kuat terhadap yang lemah (Mujibur Rohman, 2009:6).

Edward W. Said dengan lantang mengkritik hegemoni Barat terhadap Timur lewat gagasannya, *Orientalisme*. Edward W. Said mengkritik konstruksi ideologis Barat atas Timur dalam karya besarnya, *Orientalism*, yang terbit pada tahun 1978. *Orientalisme* menjadi narasi terbesar kolonialisme dalam bentuk studi, penulisan, dan penciptaan image mengenai Timur. *Orientalisme* diartikan sebagai gaya berpikir yang mendasarkan pada pembedaan secara ontologis maupun epistemologis yang dibuat antara "Timur" (the Orient) dan "Barat" (the Occident) (Edward W. Said terj Asep Hikmat, 2001:3). Kajian-kajian mengenai dunia Timur sebagai dunia yang lain, sesungguhnya tidak bebas dari kepentingan, baik kepentingan kekuasaan maupun kepentingan ideologis. Menurut Edward W. Said, *Orientalisme* merupakan sebuah diskursus, dimana Barat secara sistematis mengatur dan menciptakan Timur secara sosiologis, politis, militer, ekonomi, dan imajinatif. Tidak hanya itu, ketahanan *orientalisme* juga tidak bisa dilepaskan dari kesadaran Barat yang begitu berdaulat dan mandiri. Kesadaran inilah yang berhasil membangun doktrin-doktrin tentang superioritas Eropa, sebagai jenis rasialisme

dan imperialisme, serta pandangan-pandangan dogmatis tentang Timur sebagai suatu jenis abstraksi yang ideal dan tidak berubah-ubah. (Edward W. Said terj Ahmad Fawaid, 2010:7).

Mengkaji kolonialisme melalui kacamata *Orientalisme*, tentu kita tidak bisa mengabaikan Michel Foucault dengan melihat bagaimana kolonialisme adalah proyek untuk "menormalkan" masyarakat terjajah sebagai usaha untuk memberadatkan mereka. Kategorisasi "normal" dan "tidak normal" dapat kita lihat melalui struktur bahasa. Struktur bahasa beroperasi melalui oposisi biner, misalnya "barat" dengan "timur", "pandai" dilawankan dengan "bodoh", "rasional" dengan "irasional". Persoalannya, dalam oposisi biner tersebut pada saat-saat tertentu menyimpan kepentingan dimana term satu mengungguli atas term lain. Bahwa hubungan oposisi antara term yang satu dengan yang lain, adalah hubungan yang hirarkis. Permasalahan lain yang lebih banyak akan muncul ketika hubungan oposisi biner bukan hanya mengakar pada kesadaran. Tapi lebih dari itu, oposisi biner dilanjutkan oleh budaya dan dilembagakan demi kepentingan tertentu (A. Sumarwan, 2005:19).

Bhaba menambahkan bahwa postkolonialitas bukan hanya menciptakan budaya atau praktek hibridasi, tetapi sekaligus menciptakan bentuk-bentuk resistensi dan negosiasi baru bagi sekelompok orang dalam relasi sosial dan politik mereka (Bhaba, 2004:113-114). Namun, hibriditas juga memungkinkan adanya pengenalan bentuk-bentuk produksi identitas baru dan bentuk-bentuk budaya. Jadi hibriditas, dapat diterima sebagai suatu alat untuk memahami perubahan budaya lewat pemutusan strategis atau stabilisasi temporer kategori budaya (Barker, 2005:210).

Dalam teori hibriditasnya Bhabha (1994:84-92) menemukan konsep “mimicry” sebagai bukti bahwa yang terjajah tidak selalu diam, karena mereka memiliki kuasa untuk melawan. Konsep mimicry digunakan untuk menggambarkan proses peniruan atau peminjaman berbagai elemen kebudayaan. Fenomena mimicry tidaklah menunjukkan ketergantungan sang terjajah kepada yang dijajah, tetapi peniru menikmati dan bermain dengan ambivalensi yang terjadi dalam proses imitasi tersebut.

Hal ini terjadi karena mimicry mengindikasikan makna yang tidak tepat dan juga salah tempat. Ia adalah imitasi sekaligus subversi. Mimicry, dengan demikian adalah tanda dari artikulasi ganda yang merupakan suatu strategi appropriate tapi bersamaan dengan itu juga inappropriate, sehingga memuat mimicry tidak pernah menghasilkan suatu identitas yang seragam, identik dan takluk dibawah kekuasaan penjajah. (Darmawan:2014:28). Dengan demikian, mimicry bisa dipandang sebagai strategi menghadapi dominasi penjajah. Seperti penyamaran, ia bersifat ambivalen, melanggengkan tetapi sekaligus menegaskan dominasinya. (Martono, 2013:125-126). Dari mimicry inilah terlihat bahwa ia adalah dasar sebuah identitas yang hibrid (Moore and Gilbert 1997:55).

Menurut Bhabha, (1994: 86) mimicry adalah suatu hasrat dari subjek yang berbeda menjadi subjek sang lain yang hampir sama, tetapi tidak sepenuhnya (as subject of a difference, that is almost the same, but not quite). Konsep mimicry Bhabha ini mengandung ambivalensi karena di satu sisi kaum pribumi ingin membangun identitas persamaan dengan kaum penjajah, sedangkan mereka juga ingin mempertahankan perbedaannya. Mimicry muncul sebagai representasi dari perbedaan, yakni perbedaan tersebut merupakan proses pengingkar.

Ambivalensi mimicry terlihat dalam tatanan berikut ini, pertama, mimicry adalah suatu strategi yang rumit untuk menata kembali, mengatur, mendisiplinkan, dan mencocokkan ‘*The Other*’ sebagai visualisasi kekuatannya. Kedua, mimicry juga merupakan ketidakcocokan, sebuah perbedaan atau perlawanan yang melekat pada fungsi strategis kekuatan dominasi kolonial. Pada prakteknya, mimicry juga mengusung paham mockery, meniru tetapi juga memperolok-olok (Bhabha, 2004: 86). Menurut Darmawan (2014:28), mockery adalah upaya mengcopy penjajah, yang kemudian berubah menjadi parodi. Tindak mimicry (peniruan identitas) oleh terjajah melahirkan hibridisasi yang berada dalam ruang ketiga, ruang pertemuan “Barat” dan “Timur” disebut Bhabha (2004: 1-4) sebagai liminal space, sebuah ruang yang dilukiskan remang-remang seperti twilight zone. Darmawan (2014:29) menyatakan ruang ketiga adalah cara mengartikulasikan, menginterupsi, menginterogasi, dan mengungkapkan bentuk baru makna kultural sehingga menghasilkan bata yang kabur. Area yang belum pasti ini menjadi jalan setapak yang menghubungkan terjajah dan penjajah atau jaringan ikat yang membangun perbedaan antara mereka, si Hitam dan si Putih. Di tempat ini semua perbedaan antara mereka dipamerkan, dan diperlihatkan. Tempat itu akhirnya menandai perbedaan kedudukan mereka, dan perbedaan identitas mereka antara penjajah dan terjajah. Oleh karena itu, teori ini menjadi relevan untuk menganalisis strategi pemerintah Yogyakarta dalam konsep penataan ruang publik (titik nol kilometer) yang menggunakan konsep mimicry dari Belanda dalam kerangka kritik postkolonial.

### **Hasil Temuan**

Kawasan titik Nol Kilometer bukan hanya sekedar pusat keramaian di Yogyakarta, terdapat sejarah yang terselip

didalamnya. Nol Kilometer yang sebagai denyut nadi Kota Yogyakarta mempunyai garis sumbu imajiner yang menghubungkan antara pantai Laut Selatan, Keraton hingga Gunung Merapi (Mustika Kusumaning Wardhani, 2018:5). Selain garis imajiner, Yogyakarta juga memiliki sumbu filosofis yakni Tugu Pal, Keraton dan Panggung Krapyak, yang dihubungkan secara nyata berupa jalan. Panggung Krapyak ke utara menuju Keraton melambangkan perjalanan manusia dari bayi lahir sampai dewasa, sedangkan dari Tugu Pal ke Keraton melambangkan perjalanan manusia kembali ke sang pencipta. Sumbu filosofis itu mempunyai makna hubungan antara manusia dan Tuhannya, manusia dengan sesama serta manusia dengan alam. Sebelum pemerintahan kota ini terbentuk, Sri Sultan Hamengkubuwono I telah memikirkan konsep penataan kota yang unik, yang secara istimewa di desain sangat strategis sebagai kota pemerintahan.

Titik Nol Kilometer Yogyakarta sebenarnya menyimpan cerita historis yang sangat mendalam dan berhubungan dengan berdirinya negara Republik Indonesia, karena ditempat ini terjadi titik serangan besar-besaran yang dilakukan oleh para pejuang yang dipimpin oleh Jenderal Soedirman dan Letkol Soeharto untuk mengusir Belanda dari kota Yogyakarta yang dikenal dengan serangan umum 1 Maret. Dalam rangka menghormati jasa para pahlawan yang telah berjuang tiada henti, maka dibangunlah monumen serangan umum 1 Maret yang berada di sebelah timur atau masuk dalam kompleks Benteng Vendebug.

Kawasan titik Nol Kilometer sangat strategis untuk dikembangkan sebagai pusat aktivitas masyarakat dan wisatawan, khususnya aktivitas budaya dan pariwisata. Sebab di sekitar kawasan titik Nol Kilometer terdapat pusat pemerintahan yaitu Kraton Yogyakarta; perdagangan atau perekonomian yaitu Malioboro, Pasar Beringharjo, kawasan

jalan Kyai Ahmad Dahlan serta kawasan jalan Wijilan yang tidak pernah sepi dan selalu dipadati wisatawan; dan pariwisata berupa bangunan-bangunan kuno yang sering juga disebut loji, yaitu bangunan-bangunan tua yang besar peninggalan Belanda. Adapun potensi yang terdapat di sekitar kawasan titik Nol Kilometer Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Hasil-hasil penelitian dan temuan harus bisa menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian di bagian pendahuluan.

**Tabel 1. Potensi wisata kawasan titik Nol Kilometer Yogyakarta**

Museum Benteng Vredeburg	Pasar Beringharjo
Taman Budaya Yogyakarta	Malioboro
Taman Pintar	Bank BNI
Gedung Bank Indonesia (BI)	Monumen Serangan Umum 1 Maret
Kantor Pos Besar (Pusat)	Kraton Yogyakarta

Sumber: Pengamatan Pribadi, 2018

Kraton Yogyakarta merupakan sebuah bangunan Kraton dengan arsitektur Jawa yang agung dan elegan yang terletak di pusat Kota Yogyakarta. Bangunan ini didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I, pada tahun 1775. Beliau yang memilih tempat tersebut sebagai tempat membangun bangunan tersebut, tepat diantara sungai Winongo dan sungai Code, sebuah daerah berawa yang dikeringkan. Bangunan Kraton membentang dari utara ke selatan. Halaman depan dari Kraton disebut alun-alun utara dan halaman belakang disebut alun-alun selatan. Desain bangunan ini menunjukkan bahwa Kraton, Tugu dan Gunung Merapi berada dalam satu garis atau poros yang dipercaya sebagai hal yang keramat. Kemudian, arsitektur bangunan-bangunannya, letak bangsal-bangsalnya, ukiran-ukirannya, hiasannya, sampai pada warna gedung-gedungnyapun mempunyai arti. Pohon-pohon yang ditanam didalamnya bukan sembarangan pohon.

Semua yang terdapat disana seakan-akan memberi nasehat kepada kita untuk cinta dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan yang Maha Esa, berlaku sederhana dan tekun, berhati-hati dalam tingkah laku sehari-hari dan lain-lain. Sedangkan warna naga merah yang ada di Kraton merupakan simbol dari keberanian. Arsitektur bangunan Kraton memang berbeda dengan bangunan Loji yang kental akan nuansa kolonialismenya.

Selain beberapa bangunan tersebut terdapat keberadaan sebuah masjid bernama Siti Djirzah yang bangunannya berkonsep Tionghoa ditengah Malioboro. Bangunan yang didominasi warna biru ini berada diantara dua toko yakni toko elektronik dan batik. Bangunan masjid tersebut dibangun pada Mei 2017 dan mulai dioperasikan pada 10 Oktober tahun 2018. Penggunaan arsitektur. Penggunaan arsitektur China dikarenakan aturan yang diberikan dari pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Khususnya Dinas Kebudayaan dengan alasan masjid tersebut berdiri pada sumbu filosofis dan berada di Malioboro dimana mayoritas pedagang beretnis China. Hal ini juga sebagai wujud pluralisme (toleransi dan saling menghormati) dalam hidup bertetangga.

Malioboro dikenal sebagai tempat berwisata belanja oleh-oleh paling diminati di Yogyakarta. Denyut aktivitas perdagangan sangat terasa di tempat itu. Keberadaan Jalan Malioboro tidak terlepas dari konsep kota Yogyakarta yang ditata membujur dengan arah utara-selatan, dengan jalan-jalan yang mengarah ke penjuru mata angin serta berpotongan tegak lurus. Pola ini diperkuat dengan adanya "poros imajiner" yang membentang dari arah utara menuju ke selatan, dengan Kraton Yogyakarta sebagai titik tengahnya. "Poros" tersebut diwujudkan dalam bentuk bangunan, yaitu Tugu Pal (Pal Putih) di utara, ke selatan berupa jalan Margatama (Mangkubumi) dan Margamulya (Malioboro), Kraton Yogyakarta, Jl. DI.

Panjaitan, berakhir di panggung Krapyak. Jika titik awal Tugu diteruskan ke utara akan sampai ke Gunung Merapi, sedang jika titik akhir Panggung Krapyak diteruskan maka akan sampai ke Samudera Hindia. Di era kolonial (1790-1945) pola perkotaan itu terganggu oleh Belanda yang membangun Benteng Vredeburg di ujung selatan Jl. Malioboro. Selain membangun benteng, Belanda juga membangun Societeit Der Vereniging Djogdjakarta (1822), The dutch Governor's Residence (1830), Javasche Bank dan Kantor Pos untuk mempertahankan dominasi mereka di Yogyakarta.

Monumen Serangan Umum 1 Maret berada di area sekitar Museum Benteng Vredeburg yaitu tepat di depan Kantor Pos Besar Yogyakarta. Monumen ini dibangun untuk memperingati serangan tentara Indonesia terhadap Belanda pada tanggal 1 Maret 1949. Ketika itu, Negara Indonesia telah dianggap lumpuh dan tidak ada oleh Belanda. Untuk membuktikan bahwa Negara Indonesia masih ada maka dilakukan serangan besar-besaran. Serangan ini dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto, Komandan Brigade 10 daerah Wehrkreise III. Saat ini, Monumen Serangan Umum 1 Maret ini merupakan salah satu landmark dan cagar budaya provinsi DIY sebagai bangunan yang mengingatkan tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada masa lalu. Di area Monumen Serangan Umum 1 Maret yang juga masih berada di kawasan nol kilometer juga sering dipakai untuk konser musik. Bangunan Monumen Serangan Umum 1 Maret ini diberikan warna putih seperti bangunan Loji lainnya.

Pada dasarnya, desain bangunan yang berada di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta, terlihat cukup unik karena terdapat perpaduan desain klasik dan modern. Desain modern yang diberikan terlihat dari adanya jalur bagi penyandang



tuna netra yang dapat membantu mereka untuk mengakses ruang publik. Kemudian desain klasik terlihat dari warna yang diberikan yaitu warna putih dengan perpaduan warna abu-abu untuk dasar lantai, coklat dan hitam untuk tempat duduk, hijau dan sentuhan kuning untuk lampu, hijau untuk penunjuk arah dan warna putih sebagai warna khas pada bangunan di sekitar titik nol kilometer. Penggunaan warna yang seragam dan tidak terlalu mencolok ini dimaksudkan untuk memberikan kesan sejuk dan damai. Sehingga masyarakat maupun wisatawan yang berada di tempat itu merasakan ketenangan jiwa dan pikiran. Sebab, mayoritas masyarakat yang datang ke titik Nol Kilometer Yogyakarta adalah untuk bersantai setelah melakukan berbagai aktivitas yang menguras tenaga dan pikiran.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis menemukan bahwa konsep desain penataan kawasan di titik nol kilometer Yogyakarta meniru gaya arsitektur bangunan negara Belanda mulai dari bangunan gedung yang memang peninggalan kolonial yang terus dijaga dan diperbaiki, lantai batu andesit bernuansa klasik modern, kursi, lampu penerang, papan arah petunjuk jalan, dan tempat duduk berbentuk bola yang berasal dari marmer. Strategi pemerintah Kota Yogyakarta dilakukan dengan upaya merevitalisasi kawasan di sekitar titik Nol Kilometer dengan tujuan untuk menjadikan kawasan titik Nol Kilometer sebagai ruang publik sekaligus tempat wisata yang akan meningkatkan APBD Kota Yogyakarta apabila banyak wisatawan yang datang ke Yogyakarta. Konsep peniruan ini dilatarbelakangi oleh sejarah yang mana Yogyakarta yang masuk dalam wilayah Republik Indonesia pernah dijajah oleh Bangsa Belanda.

Yogyakarta sendiri memiliki kontribusi tersendiri terhadap Republik Indonesia seperti (Dokumen Rencana Induk Kawasan

Budaya Perkotaan Yogyakarta 2014-2034, 2014:9):

1. DIY berperan saat RI mengalami masa-masa sulit di masa awal kemerdekaan karena uang yang dimiliki habis untuk membayar para pegawai pemerintah tiga bulan pertama, saat itu pemerintahan RI dipindah ke Yogyakarta pada agresi militer II Belanda.
2. Pada tahun 1945-1948 bahkan sampai awal 1949 dimana Ibukota Indonesia yang masih berada di Jakarta sedang dalam suasana mencekam karena ribuan orang tewas dibantai oleh Belanda, Jepang dan bahkan penduduk pribumi sendiri hingga pada akhirnya Soekarno-Hatta pun mengungsi ke Yogyakarta beserta keluarganya.
3. Pada tanggal 1 Maret 1949, di Yogyakarta terjadi perang selama enam hari yang kemudian dikenal dengan "Serangan Umum 1 Maret". Keterlibatan pihak Keraton Yogyakarta sangat besar dan menentukan kemenangan dalam Serangan Umum Satu Maret. Peristiwa inilah yang kemudian dikenal sebagai "Jogja Kembali" dan menjadi alasan dibukanya kembali perundingan Konferensi Meja Bundar antara pemerintah RI dan Belanda.
4. Pada saat diadakan KMB di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus sampai 2 November 1949. Dilakukan serahterima kedaulatan dari pemerintah kolonial Belanda kepada Republik Indonesia.

Berbagai peristiwa itulah yang melatarbelakangi nama DIY yang akan terus menjadi daerah yang istimewa. Hal ini pula yang melatarbelakangi lahirnya konsep mimicry dalam penataan kawasan titik Nol Kilometer Yogyakarta karena pemerintah

tidak berusaha menghilangkan peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di sekitar kawasan titik Nol Kilometer. Sehingga strategi pendekatan yang diambil oleh pemerintah Yogyakarta untuk meningkatkan kualitas wisata yaitu dengan konsep peniruan gaya arsitektur kolonial Belanda dengan langkah awal yaitu merivitalisasi kawasan titik Nol Kilometer untuk lebih meningkatkan kenyamanan para wisatawan yang datang ke Yogyakarta termasuk masyarakat Yogyakarta sendiri.

Pengerjaan revitalisasi kawasan Titik Nol Kilometer yang berada di pusat Kota Yogyakarta ini sudah dimulai sejak 3 September 2015 dengan mengeluarkan dana Rp 4,6 Miliar yang bersumber dari Dana Keistimewaan (Danais) Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015. Menurut Bambang Sughaib sebagai Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi dan Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY yang mengatakan bahwa sebagian anggaran digunakan untuk pengerjaan beton jalan dan pembelian batu andesit, dan sisanya untuk pembiayaan yang lain-lain.

Proyek revitalisasi ternyata tidak hanya sekedar mengganti aspal dengan batu andesit, namun juga memperkuat fondasi jalan di bawah batu andesit dengan menggali tanah di sekitar kawasan Titik Nol Kilometer sedalam 35 cm, lalu di cor beton dan dipasang batu andesit berwarna hitam keabu-abuan, dengan total luas wilayah yang dipasang batu andesit mencapai 1.570 meter persegi. Pengerjaan proyek revitalisasi ini dilakukan oleh PT Soyuren Indonesia yang telah memenangi proses lelang terbuka. Saat ini, penataan kawasan titik Nol Kilometer Yogyakarta telah selesai pada akhir tahun 2018 dengan biaya untuk pedestrian mencapai Rp 37 Miliar.

Titik Nol Kilometer Yogyakarta sendiri berada tepat di pertemuan Jalan Ahmad Dahlan, Jalan Panembahan Senopati, dan

Jalan Ahmad Yani, serta jalan menuju Alun-Alun Utara Keraton Yogyakarta. Sehingga sangat strategis sebagai ruang publik masyarakat dan kawasan wisata sejarah Yogyakarta. Hal ini terbukti dengan jumlah kunjungan wisatawan ke Yogyakarta pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017. Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan tahun 2018 melebihi target yang telah ditargetkan yaitu 5%, dimana persentase peningkatan kunjungan wisatawan sebesar 5,35%.

**Tabel 2. Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan Lima Tahun Terakhir**

Tahun	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Persentase Kenaikan (%)	Keterangan
2014	3.007.253	10,74	Kenaikan
2015	3.250.681	8,09	Kenaikan
2016	3.261.748	0,3	Kenaikan
2017	3.894.711	19,41	Kenaikan
2018	4.103.240	5,35	Kenaikan

Sumber: Dokumen Laporan Kinerja Dinas Pariwisata Tahun Anggaran 2018

Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan sebesar 5,35% pada tahun 2018 dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya; pengembangan dan peningkatan fasilitas daya tarik wisata utama di Kota Yogyakarta khususnya di kawasan titik nol kilometer tepatnya Malioboro; perkembangan wisata belanja dan kuliner yang pesat, menjadi salah satu andalan daya tarik wisata Kota Yogyakarta, dimana Pasar Beringharjo yang pedagangnya menjual makanan memilih tetap buka pada malam hari, sehingga meningkatkan daya tarik kuliner khas Yogyakarta. Sedangkan, capaian realisasi APBD sebesar 87,88% atau Rp

30.456.428.557,82,- dari jumlah anggaran sebesar Rp 34.655.638.190,- dikarenakan beberapa volume kegiatan yang tidak dapat terlaksana dengan maksimal sesuai target yang diinginkan. (Dokumen Laporan Kinerja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2018: 11)

### **Analisis Teoritis dan Empiris**

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai salah satu pusat kebudayaan khususnya budaya Jawa sesuai dengan masyarakatnya yang berbudi luhur. Hal ini didukung oleh keberadaan dua buah Keraton yaitu Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pura Pakualam. Kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat cukup beragam khususnya peninggalan bersejarah dan petilasan yang turut melengkapi predikat kota budaya. Keberagaman potensi budaya yang terdapat di Kota Yogyakarta ini terdiri dari budaya tangible (fisik) dan intangible (non fisik). Potensi budaya fisik antara lain kawasan dan benda cagar budaya sedangkan potensi non fisik seperti gagasan, sistem, nilai atau norma, sistem sosial yang ada pada masyarakat ini ternyata menyumbang kontribusi besar pada perancangan kota Yogyakarta.

Model yang digunakan dalam tata ruang wilayah Kota Yogyakarta adalah pemusatan intensitas kegiatan manusia pada suatu koridor tertentu yang berfokus pada pusat kota dan jalan koridor sekitarnya. Hal ini sesuai dengan keadaan lapangan yang mana kawasan titik Nol Kilometer yang berada di pusat Kota dibangun dengan desain yang unik untuk dijadikan sebagai ruang publik yang diminati oleh berbagai kalangan masyarakat untuk berinteraksi dan melakukan berbagai macam kegiatan baik individu maupun kelompok. Hal ini karena dalam perencanaan kota menurut Darmawan yang mengatakan bahwa ruang publik memiliki fungsi sebagai wadah interaksi,

komunikasi warga, baik interaksi formal hingga non formal, kemudian sebagai tempat pedagang kaki lima yang menjajakan makanan dan minuman, souvenir, dan jasa entertainment.

Adanya ruang publik ternyata membuka peluang usaha bagi masyarakat lain untuk mencari rezeki. Kawasan titik Nol Kilometer yang berada dipusat kota Yogyakarta yang setiap harinya selalu ramai dikunjungi masyarakat ternyata banyak dimanfaatkan oleh masyarakat lain untuk membuka lapak maupun berjualan keliling menjajakan mainan, makanan, minuman, souvenir, dan lain-lain. Sebenarnya dengan kondisi yang seperti ini dapat mengurangi kenyamanan masyarakat maupun wisatawan yang datang ke titik Nol Kilometer. Kehadiran para pedagang asongan dengan tujuan mencari rezeki, nyatanya malah menimbulkan rasa ketidaknyamanan para pengunjung, selain sampah dari bekas makanan, mereka juga membuat kesan eksotis di kawasan malioboro sedikit berkurang. Beberapa orang yang berkunjung ke titik Nol Kilometer banyak menghabiskan waktunya untuk berfoto tetapi dengan adanya pedagang di latar belakang foto membuat kesan eksotis itu sedikit menghilang. Padahal ruang publik itu harusnya memberikan kenyamanan terhadap masyarakat.

Desain kawasan di titik Nol Kilometer memang sangat memanjakan mata dengan keragaman visual yang ditawarkan, mulai dari bangunan gedung besar bergaya kolonial peninggalan Belanda seperti Kantor POS besar, Bank BNI dan Bank Indonesia meingkatkan daya tarik dan nilai estetika ketika pengguna sedang duduk dan berjalan di sekitar kawasan titik nol kilometer. Konsep desain kawasan titik nol kilometer yang apabila dilihat lebih dalam menggunakan kritik post kolonial yang muncul sebagai bentuk kritik terhadap penjajahan. Karena dahulu Yogyakarta yang masuk dalam wilayah

Republik Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Belanda, banyak sekali peristiwa yang terjadi di daerah ini yang puncaknya pada serangan umum 1 Maret 1949. Dalam rangka menghormati jasa para pahlawan yang telah berjuang tiada henti, maka dibangunlah monumen serangan umum 1 Maret yang berada di sebelah timur atau masuk dalam kompleks Benteng Vendebug.

Selain itu, pemerintah Yogyakarta juga berinisiatif untuk meniru beberapa arsitektur tempat bernuansa Belanda khususnya di kawasan titik nol kilometer Yogyakarta untuk mengenang dan bukti bahwa telah lepas dari jajahan bangsa Belanda. Hal ini sesuai dengan konsep *mimicry Bhabha* yang mengandung ambivalensi karena di satu sisi kaum pribumi Yogyakarta ingin membangun identitas persamaan dengan kaum penjajah Belanda, tetapi disisi lain mereka juga ingin mempertahankan perbedaannya. *Mimicry* muncul sebagai representasi dari perbedaan, yakni perbedaan tersebut merupakan proses pengingkaran. Konsep *mimicry* ini pada prakteknya, mengusung paham *mockery* yaitu meniru tetapi juga memperolok-olok (Bhabha, 2004: 86). Menurut Darmawan (2014:28), *mockery* adalah upaya meng-copy penjajah, yang kemudian berubah menjadi parodi. Konsep peniruan gaya arsitektur di kawasan titik nol kilometer yang digunakan sebagai ruang publik sekaligus kawasan wisata untuk menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara ini bila dilihat dari kritik post kolonial mempunyai pesan tersirat bahwa Yogyakarta bukan lagi daerah yang dijajah oleh bangsa Belanda walaupun dahulu Belanda pernah menguasai daerah Yogyakarta.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dari analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka didapatkan hasil dari penelitian terkait penataan kawasan titik Nol Kilometer Yogyakarta, Penataan kawasan titik Nol Kilometer Yogyakarta bertujuan untuk

memperindah kawasan tersebut sebagai ruang publik masyarakat sekaligus tempat wisata karena letaknya yang strategis tepat berada di pusat Kota Yogyakarta. Selain itu, desain tempat di kawasan titik Nol Kilometer berkaitan dengan kritik post kolonial dalam konsep *mimicry* yang sebagai bentuk peniruan budaya kolonial Belanda yang didalamnya menyimpan cerita sejarah perjuangan bangsa Indonesia pada masa penjajahan. Terakhir, kawasan titik Nol Kilometer merupakan ruang publik yang baik karena ditempat tersebut dapat dilakukan berbagai macam kegiatan yang membentuk interaksi sosial penggunanya yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat.

Kawasan disekitar titik Nol Kilometer selain sebagai ruang publik juga sebagai pusat perekonomian masyarakat Yogyakarta setiap hari seperti Malioboro dan Pasar Beringharjo yang selalu dipadati oleh wisatawan dari berbagai daerah. Titik Nol Kilometer merupakan tempat yang strategis karena berada dekat pusat pemerintahan Yogyakarta, seperti Keraton.

Kemudian, mengenai upaya pemerintah yang melakukan penataan kawasan titik Nol Kilometer Yogyakarta dengan memadukan konsep budaya lokal dan asing ini sebagai strategi menarik para wisatawan dalam dan luar negeri untuk berkunjung ke Yogyakarta. Dengan deretan bangunan bersejarah dan kuno yang berada di kiri kanan, seolah menjadi saksi bisu sejarah yang pernah tertoreh di kawasan tersebut.

Konsep penataan kawasan titik Nol Kilometer Yogyakarta yang meniru gaya arsitektur bangunan Belanda ini sebenarnya sebagai bentuk ekspresi kemerdekaan dari daerah terjajah. Dimana dulu, Belanda pernah menduduki Daerah Istimewa Yogyakarta dan membangun gedung-gedung pemerintahannya. Kemudian, setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Maka pemerintah Indonesia membiarkan

gedung-gedung maupun tempat-tempat yang dibangun oleh bangsa penjajah dipertahankan bahkan direnovasi supaya tetap berdiri kokoh. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh pemerintah Yogyakarta. Walaupun kebijakan tersebut mengandung sebuah ambivalensi dimana pemerintah Yogyakarta tetap mempertahankan bangunan bangsa penjajah dengan baik namun disatu sisi pemerintah juga berupaya menciptakan ruang baru yang kental dengan budaya Jawa sebagai ciri khas masyarakatnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bhabha, H. K. (1994). *The Location of Culture*. Routledge: London and New York.
- Bhabha, H. K. (2004). *The Location of Culture*. Routledge: London and New York.
- Barker, Chris. (2005). *Cultural Studies (terj)*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Carmona, et al. (2003). *Public places – Urban Spaces*, The Dimension of Urban Design Architectural press.
- Darmawan, Darwin. (2014). *Identitas Hybrid Orang Cina*. Yogyakarta: Gading Publishing.
- Dokumen. (2018). *Laporan Kinerja dinas Pariwisata Kota Yogyakarta tahun anggaran 2018*. Yogyakarta.
- Dokumen. (2014). *Rencana Induk Kawasan Budaya Perkotaan Yogyakarta 2014-2034*. Yogyakarta.
- Gani, R. (2017). *Taman Kota Sebagai Modal Sosial Dan Interaksi Masyarakat Kota Bandung*, Jurnal Signal Unswagati Cirebon.
- Moore, B. and Gilbert. (1997). *Postcolonial Theory: Contexts, Practice, Politics*. London: Versco.
- Mujibur Rohman. (2009). *Edward Said dan Kritik Post Kolonial: Upaya Mengembalikan Sosiologi Kepada Publik*, Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Mutiara Arbaita Aulia. (2017). *Perancangan dan Perencanaan Museum Filateli dan Kantor di Kantor POS Besar Yogyakarta*. Jurnal Mahasiswa Jurusan Desain Interior, Fakultas Seni Rupa. Yogyakarta: Institut Seni Indonesia.
- Mustika Kusumaning Wardhani. (2018). *Titik Nol Kilometer Kota Yogyakarta Sebagai Ruang Terbuka Publik Ditinjau Dari Dimensi Fungsional, Sosial, dan Visual*. Jurnal Psikologi, Vol. 15 No. 1, 2018.
- Rahman, B. (2017). *Peran Teknologi Game Berthema Simulasi Pembangunan Kota Terhadap Persepsi Pembentukan Penataan Pola Ruang Kota*, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Smartcity, Semarang.
- Said, Edward W. (2001). *Orientalisme, terj. Asep Hikmat*. Bandung: Penerbit Pustaka.
- Said, Edward W. (2010). *Orientalisme: Menggugat Hegemoni Barat dan Mendudukkan Timur Sebagai Subjek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumarwan, A. (2005). *Membongkar yang Lama, Menenun yang Baru*. Basis, Nomor 11-12, November-Desember 2005.